

PERAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DALAM MENDORONG AKSI KOLEKTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS GERAKAN IKLIM INTERNASIONAL

Irgi Fahrezi Hidayat¹, Muhammad Sulthan Fatih², Shakil Safdar³, Aniqotul Ummah⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3,4}

¹2310413048@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310413084@mahasiswa.upnvj.ac.id

³2310413102@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴aniqotul.ummah@upnvj.ac.id.

Received: 09-12- 2024

Revised: 20-12-2024

Approved: 29-12-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kewarganegaraan global dan perubahan iklim melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Kewarganegaraan global, yang mencakup kesadaran kolektif dan tanggung jawab individu terhadap isu lintas batas, menjadi konsep penting dalam mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim. Temuan menunjukkan bahwa kewarganegaraan global berperan sebagai katalisator dalam mendorong kesadaran lingkungan, kolaborasi antarnegara, dan aksi individu untuk mengurangi jejak karbon. Namun, tantangan dalam penggalangan aksi kolektif, seperti resistensi antar generasi dan fragmentasi narasi, memengaruhi efektivitasnya. Pendekatan narasi yang inklusif dan kolaboratif menjadi solusi potensial untuk membangun solidaritas lintas kelompok dan generasi dalam menghadapi krisis iklim. Dengan integrasi konsep kewarganegaraan global dalam pendidikan dan kebijakan, individu dan komunitas dapat lebih aktif berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, kebijakan, dan aksi kolektif dalam membangun dunia yang lebih ramah lingkungan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Global, Perubahan Iklim, Mitigasi, Pendidikan Berkelanjutan, Solidaritas

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Fenomena perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik di berbagai belahan dunia (Ulfa, 2024). Dalam konteks ini, kewarganegaraan global muncul sebagai konsep penting yang dapat mendorong aksi kolektif untuk mengatasi perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, individu dan komunitas di seluruh dunia dapat berperan aktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif (Anggraeni et al., 2023). Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk emisi gas rumah kaca yang meningkat akibat aktivitas manusia. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), suhu global diperkirakan akan meningkat antara 1,5 hingga 2 derajat Celsius pada tahun 2100 jika tidak ada tindakan signifikan yang diambil. Dampak dari perubahan ini meliputi peningkatan frekuensi bencana alam, penurunan kualitas air dan tanah, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup spesies (Malihah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif di tingkat internasional dan nasional untuk mengatasi masalah ini.

Kewarganegaraan global merujuk pada identitas individu sebagai anggota komunitas global yang lebih besar, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan planet dan masyarakat secara keseluruhan (Fakhri, 2023). Konsep ini menekankan pentingnya solidaritas, toleransi, dan keadilan sosial, yang menjadi landasan dalam mendorong aksi kolektif terhadap masalah global, termasuk perubahan iklim. Melalui pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu

global, individu dapat dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam solusi yang berkelanjutan (Fatmawati & Ningsih, 2024).

Di tingkat internasional, berbagai kesepakatan telah diadopsi untuk menangani perubahan iklim, seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Kedua dokumen ini menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk ketidaksetaraan dalam kontribusi dan dampak perubahan iklim di berbagai negara. Negara-negara berkembang seringkali menjadi yang paling terdampak, meskipun mereka menyumbang lebih sedikit terhadap emisi global (Zuhairini et al., 2024). Oleh karena itu, kewarganegaraan global menjadi penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan semua pihak, terutama yang paling rentan, didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Di tingkat nasional, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu, dapat berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan, mempromosikan kesadaran lingkungan, dan berkontribusi pada proyek-proyek keberlanjutan. Kewarganegaraan global dapat menginspirasi tindakan kolektif di tingkat lokal, di mana inisiatif berbasis komunitas dapat diadopsi untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (Prasetiyo & Budimansyah, 2016).

Penting untuk menekankan peran kewarganegaraan global dalam mendorong aksi kolektif terhadap perubahan iklim (Aulia et al., 2024). Melalui pendidikan, partisipasi, dan kerjasama antarnegara, individu dan komunitas dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Rancangan proposal ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran kewarganegaraan global dalam konteks perubahan iklim dan mendorong partisipasi aktif di tingkat lokal dan internasional. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan aksi nyata yang berkontribusi pada keberlangsungan planet kita.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menwibisodapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif (Mulyana, 2018). Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari suatu fenomena (Hardani et al., 2020). Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dengan mengumpulkan data secara menyeluruh. Hal yang diutamakan dalam metode kualitatif adalah pengamatan suatu fenomena dan melakukan penelitian ke substansi makna dari fenomena tersebut. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan sangat berpengaruh terhadap analisis dan ketajaman dari penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. studi dokumen yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan beberapa kajian yang ditelaah. Sumber utama dalam studi dokumen yaitu buku, dilanjutkan dengan artikel atau jurnal, dan terakhir adalah situs-situs yang ada di internet. Dokumen yang sudah diperoleh kemudian akan dianalisis yang membentuk kajian yang sistematis, terpadu, dan rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kewarganegaraan Global dengan Perubahan Iklim

Kewarganegaraan global adalah konsep yang merujuk pada kesadaran kolektif dan tanggung jawab individu terhadap komunitas dunia di luar batas-batas geografis dan politik negaranya. UNESCO mendefinisikannya sebagai perasaan memiliki komunitas global yang lebih luas dengan kesadaran akan saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perspektif ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti solidaritas, tanggung jawab global, dan kolaborasi antarindividu dan negara dalam mengatasi tantangan global (Estuningtyas & Dwi Ratna, 2020). Kewarganegaraan global mencakup kesadaran akan isu-isu lintas batas, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, migrasi, dan pandemi. Dalam konteks globalisasi, konsep ini terus berkembang dan menjadi penting karena keterkaitan antara isu lokal dan global semakin erat. Global adalah perpaduan antara hak asasi manusia dan tanggung jawab atas dunia sebagai upaya moral (Cicilia et al., 2022). Sementara itu, Rahmadiyah et al., (2023) menempatkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai inti dari kewarganegaraan global.

Definisi dan implementasi kewarganegaraan global masih menjadi perdebatan. UNESCO (2015) menyebutkan bahwa konsep ini lebih merupakan etos atau metafora daripada keanggotaan formal. Pandangan para ahli pendidikan, moralitas, dan sosial-politik sering kali beragam, sehingga menciptakan tantangan dalam mengkonseptualisasikannya. Namun, secara sederhana, hakikat dari kewarganegaraan global adalah melampaui batas negara dengan peran aktif dalam menjawab tantangan global (Istianah & Komalasari, 2023).

Kewarganegaraan global melibatkan kesadaran akan tantangan global dan peran individu serta komunitas dalam menyikapinya. Kewarganegaraan global ke dalam dua kategori utama yaitu kosmopolitanisme, yang mencakup aspek politik, moral, ekonomi, dan budaya, serta advokasi, yang mencakup aspek sosial, kritis, lingkungan, dan spiritual. Kewarganegaraan global menjadi tiga kategori yaitu meliputi kewarganegaraan global terbuka, moral, dan sosio-politik. Kewarganegaraan global terbuka menekankan kesadaran akan keberagaman dan interaksi lintas budaya. Kewarganegaraan moral menekankan tanggung jawab universal terhadap kemanusiaan. Sedangkan kewarganegaraan sosio-politik melibatkan partisipasi dalam keputusan politik yang memengaruhi kehidupan individu di tingkat lokal hingga global. Kewarganegaraan global bertujuan untuk membentuk individu yang peduli terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Hal ini penting untuk membangun komunitas dunia yang kooperatif dan damai, di mana individu dan negara bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh satu negara (Mahmud et al., 2024).

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global paling mendesak abad ini. IPCC (2013) mencatat bahwa campur tangan manusia, terutama melalui emisi gas rumah kaca, telah meningkatkan suhu rata-rata global sekitar 0,8°C sejak abad ke-19. Jika tidak ada langkah mitigasi tegas, suhu ini dapat meningkat hingga 4°C pada akhir abad ke-21, dengan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia (IPCC, 2014) dalam (Ulfah et al., 2023). Kewarganegaraan global memainkan peran penting dalam menyikapi perubahan iklim. Sebagai katalisator, konsep ini mendorong kesadaran lingkungan, kolaborasi antarnegara, dan tindakan individu untuk mengurangi jejak karbon. Komitmen bersama seperti Paris Agreement menunjukkan

bagaimana kewarganegaraan global menjadi landasan untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim.

Indonesia, misalnya, telah menyelaraskan kebijakan keberlanjutan dengan komitmen internasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3%, sejalan dengan Kesepakatan Paris. Agenda pembangunan rendah karbon ini mencakup konservasi laut dan mitigasi bencana, yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (RPJMN, 2020). Tindakan individu juga berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim. Studi UNESCO (2015) menekankan pentingnya perubahan gaya hidup, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan transportasi ramah lingkungan. Dalam hal ini, pendidikan untuk kewarganegaraan global dapat mendorong individu untuk bertindak lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi ekosistem tetapi juga sektor ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Misalnya, kenaikan permukaan laut akibat mencairnya gletser dan pemanasan air laut mengancam kehidupan di pesisir. Kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak ini (IPCC, 2014).

Tantangan Gerakan Iklim Internasional dalam Menggalang Aksi Kolektif

Perubahan iklim adalah tantangan global yang mendesak, tetapi penggalangan aksi kolektif untuk mencegahnya menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Masalah ini bukan hanya terkait dengan aspek teknis atau ilmiah, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, politik, dan psikologis. Untuk memahami tantangan tersebut, penting untuk mengeksplorasi narasi yang dibangun oleh para aktivis, hambatan psikologis, serta dinamika kelompok yang memengaruhi mobilisasi aksi kolektif. Narasi yang dibangun oleh para aktivis muda telah menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kesadaran global tentang urgensi krisis iklim. Greta Thunberg, salah satu figur paling menonjol, menyampaikan kritik keras terhadap ketidakadilan sistemik yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam pidatonya di COP24, ia menyoroti bahwa peradaban telah dikorbankan demi keuntungan segelintir orang kaya di negara maju yang menikmati kemewahan dengan mengorbankan lingkungan. Pemimpin dunia karena terlalu berfokus pada gagasan pertumbuhan ekonomi hijau tanpa benar-benar mengambil tindakan konkret untuk mengatasi akar masalah (Nasikhin et al., 2022).

Narasi ini dirancang untuk mengarahkan perhatian pada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas krisis iklim. Aktivis muda secara konsisten menggunakan pola narasi yang mengidentifikasi "korban" dan "pelaku." Generasi muda dan lingkungan digambarkan sebagai korban, sementara pemimpin politik, generasi terdahulu, dan media yang mengabaikan isu perubahan iklim sering kali ditempatkan sebagai pelaku. Misalnya, Komal Kumar, seorang aktivis muda dari Fiji, menyuarakan bahwa generasinya hidup dalam kecemasan dan ketakutan yang terus-menerus akibat dampak perubahan iklim. Hal ini menggarisbawahi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh generasi muda terhadap generasi sebelumnya yang dinilai telah gagal melindungi masa depan bumi (UN News, 2019). Narasi korban dan pelaku memiliki kekuatan emosional yang besar, yang mampu memobilisasi dukungan, terutama di kalangan generasi muda yang merasa terhubung dengan pesan tersebut. Pendekatan ini juga membangkitkan rasa keadilan kolektif, di mana mereka yang merasa tidak terwakili atau terpinggirkan mulai merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak. Namun, meskipun narasi ini berhasil menarik perhatian dunia, pendekatan ini juga

menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah risiko bahwa narasi yang terlalu konfrontatif dapat menimbulkan resistensi dari kelompok yang menjadi sasaran kritik.

Generasi tua atau pihak yang merasa dituduh sebagai pelaku utama sering kali menunjukkan sikap defensif atau bahkan menjadi tidak peduli terhadap pesan tersebut. Mereka mungkin menganggap narasi tersebut sebagai serangan pribadi atau sebagai pengabaian terhadap upaya mereka di masa lalu dalam menghadapi isu-isu lingkungan. Hal ini dapat memperlemah mobilisasi kolektif, karena kerja sama lintas generasi menjadi lebih sulit dicapai. Ketidakharmonisan narasi ini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan mengurangi efektivitas upaya kolektif untuk menghadapi perubahan iklim. Selain itu, ada tantangan untuk memastikan bahwa narasi ini inklusif dan tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu. Misalnya, masyarakat di negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim sering kali merasa tidak cukup terwakili dalam wacana global yang didominasi oleh perspektif negara maju. Jika narasi aktivis muda terlalu fokus pada pengalaman mereka di negara-negara maju, hal ini dapat menciptakan kesenjangan persepsi antara mereka dengan masyarakat di belahan dunia lainnya yang menghadapi dampak perubahan iklim secara langsung dan berbeda.

Penting bagi aktivis muda untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam narasi mereka. Mengakui kontribusi generasi terdahulu dalam memperjuangkan isu lingkungan dan membangun narasi yang melibatkan semua kelompok, termasuk yang dianggap sebagai pelaku, dapat membantu menciptakan solidaritas lintas generasi dan lintas wilayah. Dengan demikian, pesan yang disampaikan tidak hanya menginspirasi tetapi juga memotivasi berbagai kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Narasi yang disampaikan oleh para aktivis muda memang telah berhasil menggerakkan kesadaran global tentang perubahan iklim. Namun, untuk memastikan dampaknya yang berkelanjutan, narasi ini perlu terus berkembang dengan mengedepankan inklusivitas, kolaborasi, dan dialog yang konstruktif. Tanpa itu, tantangan-tantangan seperti resistensi dan fragmentasi dapat menghalangi upaya kolektif untuk mengatasi krisis iklim. Hanya melalui pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak, narasi ini dapat menjadi fondasi bagi perubahan nyata yang diharapkan oleh para aktivis dan masyarakat global.

Perubahan iklim sering kali dirasakan sebagai tantangan yang sangat besar, sehingga individu merasa tindakan mereka tidak cukup untuk membuat perubahan signifikan. Kondisi ini menciptakan perasaan tidak berdaya (*helplessness*) yang sering kali berujung pada apatisme. Dilema kolektif menjadi masalah utama, di mana individu merasa kontribusi pribadi mereka tidak berarti jika orang lain tidak turut bertindak. Akibatnya, meskipun kesadaran terhadap isu iklim meningkat, aksi nyata untuk mitigasi perubahan iklim tetap terbatas. Salah satu solusi untuk mengatasi perasaan tidak berdaya ini adalah melalui penciptaan identitas sosial yang kuat. Berdasarkan teori identitas sosial oleh Tajfel dan Turner (1986), individu yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok dengan tujuan bersama akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan norma kelompok tersebut. Dalam konteks perubahan iklim, pendekatan ini diterapkan melalui *Social Identity Model of Pro-Environmental Action (SIMPEA)*, yang menekankan peran norma kelompok, emosi kolektif, dan keyakinan akan efikasi kolektif. Ketika seseorang merasa bahwa kelompok mereka memiliki pengaruh nyata untuk membuat perubahan, mereka cenderung lebih aktif dalam tindakan kolektif pro-lingkungan.

Membangun identitas sosial pro-lingkungan tidaklah mudah, terutama di tengah masyarakat yang terfragmentasi secara ideologis. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, perbedaan pandangan antara pendukung Partai Demokrat dan Republik memengaruhi persepsi mereka terhadap perubahan iklim dan kebijakan lingkungan. Pendukung Demokrat cenderung menerima urgensi krisis iklim dan mendukung aksi kolektif, sementara pendukung Republik lebih skeptis terhadap isu ini. Perbedaan ini menciptakan hambatan dalam membangun konsensus dan kerja sama lintas kelompok untuk mitigasi perubahan iklim. Upaya untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komunikasi yang mampu menjembatani perbedaan ideologi. Salah satu pendekatan adalah menggunakan narasi inklusif yang menekankan nilai-nilai universal, seperti keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Dengan cara ini, pesan lingkungan dapat lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok, terlepas dari afiliasi ideologi atau politik mereka. Pendekatan lain adalah mempromosikan identitas kolektif yang lebih luas, seperti "warga dunia," untuk mengatasi fragmentasi yang disebabkan oleh identitas kelompok yang sempit.

Mobilisasi kolektif menghadapi tantangan besar karena perbedaan prioritas dan kepentingan di antara berbagai kelompok. Komunitas di negara berkembang sering kali lebih fokus pada adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang langsung dirasakan, seperti bencana alam atau kerawanan pangan. Di sisi lain, negara maju cenderung menekankan mitigasi, seperti pengurangan emisi karbon melalui inovasi teknologi. Perbedaan ini menghambat terciptanya strategi global yang terpadu. Konsep kewarganegaraan global (*global citizenship*) menawarkan solusi untuk menyatukan berbagai pihak dalam aksi kolektif. Kewarganegaraan global menekankan kesadaran akan keterkaitan semua individu sebagai bagian dari komunitas dunia yang lebih besar, dengan tanggung jawab bersama untuk melindungi planet ini. Pendekatan ini sejalan dengan teori kosmopolitanisme yang melihat umat manusia sebagai komunitas global yang memiliki kepentingan bersama. Kewarganegaraan global dapat menciptakan solidaritas lintas batas negara, meskipun sering terhambat oleh kepentingan nasional yang bertentangan dan ketimpangan ekonomi global.

Teori komunitarianisme juga relevan. Pendekatan komunitarianisme menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam komunitas lokal. Menurut Etzioni (2018), keterlibatan kolektif dapat diperkuat dengan menanamkan nilai-nilai solidaritas, yang jika diterapkan dalam skala global, dapat mendorong aksi kolektif. Namun, penting untuk tidak mengabaikan pluralisme dan kebebasan individu, yang juga menjadi elemen penting dalam kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan mobilisasi kolektif. Dengan mendorong identitas bersama sebagai "warga dunia," konsep ini mampu melampaui batas-batas geografis dan ideologis. Hal ini penting untuk mengatasi polarisasi yang sering muncul dalam diskusi perubahan iklim, terutama antara negara maju dan berkembang. Misalnya, kampanye internasional seperti Fridays for Future telah menunjukkan bagaimana narasi kewarganegaraan global dapat memotivasi jutaan individu di seluruh dunia untuk turun ke jalan menuntut aksi terhadap perubahan iklim. Identitas global yang kuat juga dapat mengatasi dilema kolektif yang sering muncul dalam mobilisasi. Menurut Andani, (2020) individu sering kali merasa tidak berdaya karena kontribusi mereka tampak tidak signifikan dibandingkan skala masalah. Namun, melalui kewarganegaraan global, individu dapat melihat tindakan mereka sebagai bagian dari upaya kolektif yang lebih besar, yang dapat memperkuat keyakinan akan efikasi kolektif. Model *Social Identity Model of Pro-Environmental Action* (SIMPEA)

menunjukkan bahwa ketika individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok global yang peduli lingkungan, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam aksi kolektif. Untuk memperkuat kewarganegaraan global, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan global yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Pendidikan semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong individu untuk mengambil tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga sangat penting. Inisiatif seperti *Green Climate Fund* dapat memperlihatkan bagaimana kerjasama lintas sektor dapat membantu negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa bantuan ini efektif.

Teknologi digital juga dapat digunakan untuk memperkuat peran kewarganegaraan global. Platform media sosial, misalnya, memungkinkan individu di berbagai belahan dunia untuk berbagi informasi, membangun solidaritas, dan mengorganisir gerakan kolektif. Kampanye seperti #ClimateAction di media sosial telah menunjukkan bagaimana narasi kewarganegaraan global dapat memobilisasi jutaan orang untuk bertindak. Menggabungkan teori kosmopolitanisme dan komunitarianisme dengan konsep kewarganegaraan global dapat menciptakan pendekatan yang lebih seimbang dalam mobilisasi terhadap perubahan iklim. Kosmopolitanisme membantu membangun solidaritas global, sementara komunitarianisme memastikan bahwa aksi tetap relevan dengan kebutuhan lokal. Kewarganegaraan global menjadi penghubung yang mengintegrasikan keduanya, menciptakan kerangka kerja yang inklusif untuk aksi kolektif. Keberhasilan mobilisasi kolektif sangat bergantung pada kemampuan kita untuk membangun identitas bersama sebagai warga dunia. Dengan mempromosikan kewarganegaraan global, kita dapat mengurangi hambatan psikologis, ideologis, dan geografis yang menghalangi aksi kolektif. Hanya melalui upaya bersama, baik di tingkat lokal maupun global, krisis iklim dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan global dan perubahan iklim memiliki hubungan erat dalam mendorong kesadaran dan aksi kolektif terhadap tantangan lingkungan. Sebagai konsep yang melampaui batas-batas negara, kewarganegaraan global menekankan tanggung jawab universal individu dan komunitas terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim. Perspektif ini tidak hanya mencakup kesadaran terhadap dampak lingkungan, tetapi juga kolaborasi lintas budaya dan negara untuk menciptakan solusi bersama. Promosi solidaritas global merupakan salah satu upaya yang penting untuk dilakukan, kewarganegaraan global memfasilitasi peran individu sebagai bagian dari komunitas dunia yang saling terkait. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan menjadi alat penting untuk membentuk kesadaran ini, mendorong gaya hidup ramah lingkungan dan keterlibatan aktif dalam mitigasi perubahan iklim. Konsep ini juga membantu mengatasi dilema kolektif melalui pembentukan identitas global yang memperkuat keyakinan akan efikasi kolektif. Kampanye seperti Fridays for Future menunjukkan bagaimana kewarganegaraan global mampu memobilisasi jutaan individu untuk bertindak melawan krisis iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, T. P. (2020). Hubungan penerimaan diri dan harga diri pada remaja dengan orangtua bercerai. *Cognicia*, 8(2), 222–233. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v8i2.11540>
- Anggraeni, N. M., . S., & . Y. (2023). Analisis Dampak Perubahan Iklim dan Pola Angin Pada Lingkungan Global. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 2(2), 1041–1047. <https://doi.org/10.47233/jpst.v2i4.1366>
- Aulia, S. S., Risti P, A. V., Hidayati, R. N., Merkuri, Y. G., & Arpanudin, I. (2024). Bagaimana Peran Guru Mendorong Siswa Menjadi Warga Global? Pemahaman Keragaman Global Pada Guru Sekolah Indonesia Dan Thailand. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(1), 101–112. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i1.3263>
- Cicilia, I., Marsidi, Martini, & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(03), 146–155. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/420>
- Estuningtyas, & Dwi Ratna. (2020). *Dampak Globalisas I Pada Politik , Ek Onomi, Cara Berfik Ir Dan Ideolo Gi Serta Tantangan Dak Wahnya*. 1–21.
- Fakhri, A. (2023). Kurikulum Merdeka dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran : Menjawab Tantangan Sosial dalam Meningkatkan Keterampilan Abad 21. *C.E.S (Confrence Of Elementary Studies)*, 1(1), 32–40.
- Fatmawati, E., & Ningsih, T. (2024). Upaya Membangun Kesadaran Global Melalui Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2024(16), 244–252.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Istianah, A., & Komalasari, K. (2023). Dampak Isu Global Terhadap Jati Diri Bangsa Dan Karakter Ke Indonesiaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA : Journal of Social Science and Education*, 4(1), 97–107. <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5576>
- Mahmud, A., Mustin, H., Hasanah, M., Ramadani, W., Islam, U., Alauddin, N., Akhlak, F., Sosial, K., & Multikultural, M. (2024). *Peran Filsafat Akhlak Dalam Resolusi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural*. 18(2015), 35–50.
- Malihah, L. (2022). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>
- Mulyana, D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Latifah (ed.)). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nasikhin, N., Raaharjo, R., & Nasikhin, N. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>
- Prasetyo, W. H., & Budimansyah, D. (2016). Warga Negara Peduli Lingkungan Dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 4(4), 177–186.
- Rahmadiyahani, A., Rahmawati, A., Idris, A. F., Nanggala, A., & Fahmi, R. (2023). Model Pendidikan Kewarganegaraan Global Di Bidang Kemanusiaan. *PELITA Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 23(2), 10–17.
- Ulfa, M. (2024). Intrathecal Fentanyl Versus Intravenous Ondansetron for Shivering Prevention in Cesarean Section: A Comparative Study. *EAS Journal of Anaesthesiology and Critical Care*, 6(01), 6–10. <https://doi.org/10.36349/easjacc.2024.v06i01.002>
- Ulfa, U. M., Widodo, Said, D. B., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023).

Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia : Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 872–879.
Zuhairini, Y., Fauzan, A. A., & Dhamayanti, M. (2024). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Sari Pediatri*, 25(6), 414.
<https://doi.org/10.14238/sp25.6.2024.414-9>